

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Posdaya adalah forum komunikasi, silaturahmi, advokasi, penerangan dan pendidikan, sekaligus wadah penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Apabila memungkinkan posdaya bisa dikembangkan sebagai wadah pelayanan secara terpadu, utamanya pelayanan kesehatan, pendidikan, wirausaha dan pengembangan lingkungan yang memudahkan keluarga berkembang secara mandiri (Mulyono, 2010).

Sejak saat itu pemerintah mulai merancang program pemberdayaan yang komprehensif dan terpadu. Dilain pihak, kita mengetahui bahwa masalah dan kebutuhan masyarakat dan keluarga Indonesia makin kompleks. Jaringan untuk proses pemberdayaan banyak yang mengalami kerusakan dan perlu segera dikembangkan kembali, menurut istilah presiden, perlu direvitalisasi. Keluarga Indonesia umumnya belum mampu mengembangkan dirinya atau menyelesaikan masalah secara mandiri, sehingga dibutuhkan jaringan berupa lembaga-lembaga dalam masyarakat yang bisa membantu penyegaran usaha gotong royong untuk membantu keluarga yang masih tertinggal tersebut (Suyono, 2010).

Untuk itu Yayasan Damandiri mengajak berbagai kalangan perguruan tinggi dan pemerintah daerah mengembangkan jaringan pelaksana dan tingkat pedesaan dan pendukuhan dalam bentuk Pos Pemberdayaan Keluarga

(POSDAYA). Posdaya dibentuk, dibina dan dikembangkan sebagai lembaga masyarakat berupa forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu yang dibentuk dan dilaksanakan dari, oleh dan untuk keluarga dan masyarakatnya.

Posdaya merupakan wadah bagi keluarga disuatu daerah, terutama keluarga yang kondisi sosial ekonominya lemah, untuk diajak bergabung dalam suatu proses pemberdayaan bersama. Pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat dapat beraktifitas pada masing-masing bidang dalam posdaya tersebut dan diberikan kebebasan atas apa yang akan diadakan melalui kegiatannya atas dasar kesepakatan dalam musyawarah (Mulyono, 2010).

Peningkatan swadaya masyarakat melalui posdaya di Kecamatan Bukateja tersebut masih perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi posdaya kepada masyarakat. Sosialisasi posdaya di Kecamatan Bukateja dari informasi yang diberikan oleh ketua posdaya Kecamatan Bukateja dilakukan dimulai dari tingkat RT sampai di Desa. Sosialisasi di tingkat RT melibatkan seluruh warga desa, sosialisasi di tingkat RW melibatkan pengurus RT dan sosialisasi di desa melibatkan pengurus RW. Sosialisasi tersebut dilakukan guna memberikan informasi tentang adanya program posdaya yang dapat di manfaatkan oleh warga masyarakat dalam kegiatan pembangunan, ekonomi, dan sosial. Selain itu juga untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan masyarakat serta

perlunya swadaya masyarakat. Namun demikian, yang baru berjalan baru pada kegiatan pembangunan (fisik).

Faktor lainnya adalah tentang keberadaan pengurus posdaya di Kecamatan Bukateja yang menjadi pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kemampuan pengurus dalam menjaring informasi dari warga masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat itu menentukan keberlanjutan pelaksanaan program posdaya di Kecamatan Bukateja.

Masyarakat membentuk atau mengembangkan kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola kegiatan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Kelembagaan di Kecamatan adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Agar proses di dalam forum-forum Musrenbang tersebut berjalan sesuai aturan yang ada, fasilitator program posdaya perlu memastikan bahwa hasil perencanaan partisipatif program posdaya menjadi masukan Musrenbang Kecamatan dan wakil-wakil masyarakat, termasuk dari lembaga keswadayaan masyarakat, dapat terlihat dari proses pengambilan keputusan di forum-forum tersebut.

Suatu program akan berlanjut dilaksanakan jika terdapat kesesuaian antara program dan pemanfaatannya. Partisipasi menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, karena tanpa partisipasi masyarakat suatu program tidak akan berjalan secara baik, seolah-olah menjadi yang harus melekat pada setiap program. Partisipasi masyarakat

dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Slamet, 1994).

Sosialisasi posdaya diperlukan untuk menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program posdaya. Sosialisasi posdaya sebagai salah satu fungsi komunikasi sangat berperan dalam melaksanakan pembangunan, sebagaimana pentingnya komunikasi itu sendiri. Sosialisasi bertujuan untuk memasyarakatkan posdaya agar masyarakat mau menerima dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang di harapkan (Soekanto, 2001).

Program posdaya untuk menggerakkan memerlukan sumber daya manusia yang mampu berpikir secara rasional dan mampu mendahulukan kewajiban dari pada haknya. Tanpa adanya SDM yang memadai tidak akan bisa menggali potensi apa yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan kearah yang diinginkan organisasi (Siagian, 1999).

Posdaya merupakan suatu program hasil inisiatif dari Yayasan Damandiri pimpinan Prof.Dr. Haryono Suyono, yang bekerja sama dengan sejumlah universitas negeri di Indonesia dan disambut baik oleh pemerintah daerah di Indonesia. Posdaya kemudian menjadi program beberapa pemerintah daerah yang pelaksanaanya didasarkan pada Undang-Undang Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai UU No.10 Tahun 1992 (Slamet, 1994).

Beberapa Kabupaten/Kota juga tergerak untuk merintis Posdaya desa/dukuh seluruh atau sebagian kecamatan seperti di Kabupaten

Purbalingga, Kudus, Pemalang, Kulon Progo, Kabupaten dan Kota Bekasi, Bandar Lampung, Banjarmasin, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur di NTB dan beberapa Kabupaten di Kota di Sulawesi Selatan. Secara terbatas juga dirintis di beberapa kabupaten dan kota di Sumatra Selatan dan Bengkulu. Jumlah Posdaya yang telah berhasil dibentuk dan beroperasi pada awal Juni 2009 mencapai lebih dari 4000 buah (Suyono, 2010).

Kabupaten Purbalingga merupakan kabupaten yang pertama kali merealisasikan Posdaya menjadi program pemerintah daerah. Pada bulan April tahun 2008 Kabupaten Purbalingga berhasil membentuk tiga posdaya percontohan yang bertempat di tiga desa, dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Yayasan Damandiri dan Universitas Jendral Soedirman. Program ini di biayai dari APBD, yaitu dengan membentuk suatu dewan kelurahan atau disingkat DK atau Dekel, Dekel ini ditugasi menampung program dan kegiatan yang ada pada tingkat kelurahan. Dekel ini disertai dengan pemberdayaan atau pembentukan lembaga keuangan Mikro ditingkat kelurahan atau kecamatan. Berikut ini adalah jumlah Posdaya yang sudah terbentuk di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Tabel 1.1 Jumlah Posdaya di Kab. Purbalingga

<b>TAHUN BERDIRI POSDAYA</b>	<b>JUMLAH POSDAYA</b>
2008	3
2009	85
2010	756
2011	1012
2012	1125

Sumber: Data BAPPEDA Kabupaten Purbalingga Tahun 2012

Berdasarkan table 1 di atas terlihat jelas bahwa jumlah posdaya pada tiap tahunnya semakin bertambah, yang semula pada tahun 2008 hanya 3 posdaya, pada tahun 2009 terdapat 85 posdaya, pada tahun 2010 terdapat 756 posdaya, namun pada tahun 2011 meningkat pesat menjadi 1012 dan berlanjut lagi pada tahun 2012 bertambah menjadi 1125 Posdaya.

Kecamatan Bukateja merupakan kecamatan yang memiliki kelompok Posdaya Sida Mukti I yang mendapat penghargaan dan menjadi percontohan Posdaya di Kabupaten Purbalingga dan mendapatkan penghargaan bidang kewirausahaan yaitu juara Nasional produk “MIE NYONG” merupakan kepanjangan mie ganyong yang terbuat dari tumbuhan ganyong. Produk mie tersebut menjadi andalan pada tahun 2008-2009 di Purbalingga dalam mengikuti pameran di Taman Mini Indonesia Indah yang dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Prestasi-prestasi Posdaya Sida Mukti I Majasari Bukateja tersebut di atas menunjukkan bahwa Posdaya Sida Mukti I Majasari Bukateja merupakan Posdaya terbaik dan menjadi percontohan dari Posdaya yang lain di Purbalingga. Berikut ini adalah jumlah Posdaya di Kecamatan Bukateja tahun 2012.

Tabel 1.2 Jumlah Kelompok Posdaya di Kecamatan Bukateja

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>NAMA POSDAYA</b>	<b>TAHUN TERBENTUK</b>
<b>AKTIF</b>			
1	Majasari	Posdaya Sida Mukti I	2008
2	Majasari	Posdaya Sida Mukti II	2008
3	Majasari	Posdaya Sida Mukti III	2010
4	Penaruban	Posdaya Melati III	2009
5	Penaruban	Posdaya Melati II	2008
6	Wirasaba	Posdaya Mardi Luhur II	2010

<b>KURANG AKTIF</b>			
7	Wirasaba	Posdaya Mardi Luhur I	2008
8	Bancar	Posdaya Lestari IV	2008
9	Majasari	Posdaya Sejahtera	2012
10	Majasari	Posdaya Sida Makmur	2009
11	Wirasaba	Posdaya Mardi Luhur III	2009
12	Wirasaba	Posdaya Mardi Luhur IV	2010
13	Wirasaba	Posdaya Mardi Luhur V	2010
14	Wirasaba	Posdaya Mardi Luhur VI	2010
15	Kembangan	Posdaya Mekar Mandiri I	2009
16	Kutawis	Posdaya Barokah	2009
17	Bojong	Posdaya Berseri	2009
18	Kedungjati	Posdaya Assyfa	2009
19	Karangnangka	Posdaya Mekarjaya	2009
20	Karanggedang	Posdaya Al-Barokah	2009
21	Cipawon	Posdaya Srikandi	2009
22	Kebutuh	Posdaya Assalam	2008
23	Tidu	Posdaya Budi Luhur I	2009
24	Bukateja	Posdaya Cahaya Mandiri	2009

Sumber : Data BAPPEDA Kabupaten Purbalingga Tahun 2012

Studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 28 Desember 2012 di Kecamatan Bukateja terdapat 24 kelompok Posdaya di Kecamatan Bukateja, yang aktif 6 posdaya dan yang kurang aktif 18 posdaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberlanjutan Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Kecamatan Bukateja”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu: “Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keberlanjutan program pos pemberdayaan keluarga (posdaya)?”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keberlanjutan program Posdaya Kecamatan Bukateja.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan faktor partisipasi masyarakat dengan keberlanjutan program posdaya.
- b. Untuk mengetahui hubungan faktor sosialisasi dengan keberlanjutan program posdaya.
- c. Untuk mengetahui hubungan faktor kualitas SDM dengan keberlanjutan program posdaya.
- d. Untuk mengetahui factor yang paling dominan terhadap keberlanjutan program posdaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi profesi keperawatan

Perawat dapat memahami pentingnya sosialisasi dan peran serta masyarakat dalam menunjang program kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Bagi Kecamatan Bukateja

Aparat Kecamatan Bukateja lebih aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posdaya untuk mendukung keberlanjutan program posdaya.

### 3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi ilmiah yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian, khususnya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keberlanjutan program Posdaya.

### 4. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pengembangan ilmu dan praktek dalam melaksanakan penelitian ilmiah.

## E. Penelitian Terkait

1. Penelitian oleh Bawabsir (2010) yang berjudul “Hubungan komunikasi dalam sosialisasi program posdaya dengan keberhasilan program posdaya”. Metode yang digunakan *survei analitik* dengan *cross sectional*. Hasil diperoleh ada hubungan komunikasi dalam sosialisasi program posdaya dengan keberhasilan program posdaya, hal ini dibuktikan dengan hasil *chi-square* nilai  $X^2_{hitung} > \text{nilai } X^2_{tabel}$  ( $26,479 > 5,991$ ) dengan taraf penerimaan  $< 0,05$ . Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti Bawabsir meneliti hubungan komunikasi dalam sosialisasi dengan keberhasilan posdaya, sedangkan penelitian ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan program posdaya.
2. Penelitian oleh Arif et. al., (2009) yang berjudul “Kajian Kapasitas Dan Keberlanjutan Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan Dan Pengelolaan Keuangan Di Unit Pengelola Kecamatan (UPK) (Studi Kasus Di Kabupaten

Temanggung dan Demak)”. Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan melakukan eksplorasi terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Demak dan Temanggung sejak tahun 2007. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas dan keberlangsungan kelembagaan PNPM Mandiri Pedesaan meliputi:

- a. Kapasitas kelembagaan program PNPM Mandiri Pedesaan telah mampu mengkoordinasikan segenap struktur kelembagaan penanganan kemiskinan, namun belum mampu secara sinergis memberdayakan dan menopang struktur kelembagaan yang ada diperintah daerah.
- b. Kelembagaan program PNPM Mandiri Pedesaan diwarnai oleh berbagai improvisasi terhadap Petunjuk Teknis Operasional, sehingga antar daerah terdapat berbagai struktur kelembagaan yang tidak mengarah pada kesederhanaan struktur.
- c. Pelembagaan program PNPM Mandiri Pedesaan belum didukung dengan payung hukum yang kuat dan sumber daya manusia yang memadai.